

BAB III

TINJAUAN FENOMENA DAN LOKASI

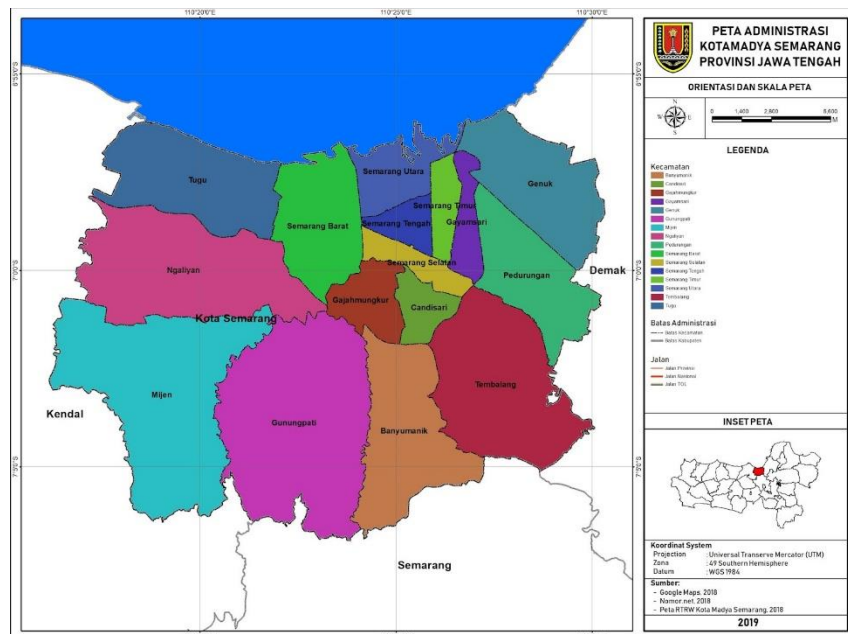
3.1. Tinjauan Kota Semarang

3.1.1. Deskripsi Umum

Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Kota ini memiliki luas wilayah mencapai 373,70 km² dan populasi sekitar 1,7 juta jiwa. Semarang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa di kawasan tersebut.

Semarang memiliki posisi strategis sebagai gerbang utama di Pulau Jawa, dilengkapi dengan infrastruktur transportasi yang baik, termasuk jalur darat, laut, dan udara. Posisi strategisnya sebagai pelabuhan penting menjadikan Semarang pusat perdagangan, industri, dan budaya di Jawa Tengah. Selain itu, letaknya yang berada di jalur pantai utara (Pantura) membuat kota ini menjadi penghubung penting bagi wilayah-wilayah lainnya di Pulau Jawa.

3.1.2. Letak Geografis



Gambar 3.1 Peta Administrasi Kota Semarang

(sumber: earth.google.com)

Kota Semarang terletak di pantai utara Pulau Jawa, Indonesia, dan merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, kota ini berada di koordinat antara 6°50' hingga 7°10' Lintang Selatan dan 109°35' hingga 110°50' Bujur Timur. Semarang memiliki topografi yang bervariasi, meliputi wilayah dataran rendah di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, hingga dataran tinggi di bagian selatan yang berbukit-bukit. Luas wilayahnya sekitar 373,8 km², dengan beberapa sungai seperti Sungai Banjir Kanal Barat dan Timur yang membelah kota. Secara geografis, kota ini terbagi menjadi dua bagian: daerah rendah (kota bawah) yang berfungsi untuk pemerintahan dan industri, serta daerah perbukitan (kota atas) yang lebih banyak digunakan untuk pertanian dan Perkebunan.

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kab. Demak
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kab. Semarang
- Sebelat Barat: berbatasan dengan Kab. Kendal

3.1.3. Tinjauan Perikanan Kota Semarang

Menurut Dinas Perikanan Kota Semarang, kota ini memiliki potensi besar di sektor perikanan karena lokasinya di pesisir utara Jawa, yang memfasilitasi distribusi hasil laut ke berbagai daerah. Salah satu TPI utama adalah Tambak Lorok, yang pada awal 2024 mencatat total produksi ikan sebesar 790 kg dengan nilai produksi Rp5 juta, melibatkan berbagai jenis ikan seperti kempar dan seriding.

Selain itu, pemerintah Kota Semarang telah mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat di Kelurahan Sumurrejo. Kawasan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan melalui budidaya, pelatihan, dan pengolahan ikan. Langkah ini didukung oleh pembangunan fisik kawasan dan kerjasama dengan kelompok pembudidaya ikan.

Secara keseluruhan, sektor perikanan di Semarang tidak hanya mendukung ekonomi lokal tetapi juga menjadi komponen penting dalam keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kombinasi fasilitas modern, pengelolaan limbah, serta program pemberdayaan memastikan sektor ini terus berkembang.

3.2. Tinjauan Tambak Lorok

3.2.1. Deskripsi Umum



Gambar 3.1 Tambak Lorok. Semarang

(sumber: images.google.com)

Tambaklorok merupakan kawasan pesisir yang berada di wilayah Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu kampung nelayan terbesar di kota tersebut. Wilayah ini memiliki ciri khas berupa aktivitas masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan tradisional, serta pemandangan perahu-perahu yang berjejer di sepanjang pesisir. Tambaklorok juga menjadi pusat kegiatan ekonomi berbasis maritim, seperti pelelangan ikan dan pengolahan hasil laut. Namun, kawasan ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk banjir rob akibat naiknya permukaan air laut, penurunan tanah, serta keterbatasan infrastruktur yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan sejumlah pihak telah melaksanakan program revitalisasi, seperti pengembangan kampung tematik berbasis pariwisata, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat sekaligus menarik perhatian wisatawan.

Kampung ini merupakan salah satu kawasan pesisir di Kota Semarang, terletak di tepi Banjir Kanal Timur dan Kali Banger, dengan luas total 46,8 hektare serta ketinggian rata-rata 0,5 meter di atas permukaan laut. Tambak Lorok menghadapi fenomena penurunan tanah (land subsidence) sebesar 9-10 cm per tahun.

Penggunaan lahan di kawasan ini terdiri dari permukiman seluas 32,4 hektare, area pelabuhan seluas 3,2 hektare, dan kolam atau tambak seluas 11,2 hektare. Tambak Lorok juga mengalami batas wilayah yang mencakup beberapa area spesifik yang mengelilinginya.

Adapun batas-batas wilayah kawasan ini sebagai berikut:

Sebelah Utara: Laut Jawa

Sebelah Selatan: Jalan Arteri Utara

Sebelah Barat: PLTUG

Sebelah Timur: Kali Banger

Dalam sistem Kota Semarang, perencanaan kawasan harus merujuk pada RTRW Kota Semarang sebagai pedoman utama. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031 menetapkan arahan untuk perencanaan kawasan. Berdasarkan RTRW tersebut, Kawasan Tambaklorok termasuk dalam BWK III dan menjadi bagian dari sistem transportasi laut Pelabuhan Tanjung Emas.

Sebagai pelabuhan utama, Pelabuhan Tanjung Emas dirancang untuk melayani aktivitas pelayaran penumpang, barang, serta alih muat peti kemas untuk transportasi laut nasional dan internasional. Upaya peningkatan kualitas pelabuhan dilakukan melalui penanganan rob dan pengaturan kawasan agar fungsinya dapat mendukung aktivitas pelabuhan secara optimal.

Lokasi Kawasan Tambaklorok yang bersebelahan dengan Pelabuhan Tanjung Emas menjadikannya bagian integral dari kawasan pelabuhan dan sekaligus wilayah strategis bagi pertumbuhan ekonomi kota. Oleh karena itu, Tambaklorok diharapkan mampu mendukung fungsi pelabuhan laut.

Arahan pengelolaan kawasan sesuai RTRW Kota Semarang meliputi:

1. Pengembangan kegiatan yang mendukung aktivitas pelabuhan.
2. Pengembangan kegiatan komersial yang terbatas dan berorientasi pada pelayanan kawasan, tanpa mengganggu fungsi pelabuhan.
3. Penataan tata bangunan di sekitar kawasan pelabuhan.

Karakteristik masyarakat nelayan di Tambaklorok erat kaitannya dengan laut sebagai pusat aktivitas mereka. Lokasi yang berbatasan langsung dengan

kolam pelabuhan membawa sejumlah keterbatasan bagi aktivitas nelayan dan pengembangan kawasan. Arahan pengaturan kegiatan laut berdasarkan Pasal 112 ayat (3) mencakup:

1. Larangan pembangunan yang mengganggu jalur kapal.
2. Larangan budidaya yang dapat menyebabkan pendangkalan jalur kapal.
3. Pemisahan jalur pergerakan antara kapal niaga dan kapal nelayan.
4. Pemasangan alat penanda untuk informasi pergerakan kapal.
5. Kegiatan di kawasan pelabuhan hanya diizinkan jika mendukung fungsi pelabuhan.

3.2.2. Kondisi Masyarakat

Sebagian besar penduduk Tambak Lorok bekerja sebagai nelayan, sehingga kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada hasil laut. Kawasan ini dikenal sebagai permukiman nelayan, yang erat kaitannya dengan lokasi penangkapan ikan, distribusi hasil tangkapan, serta akses ke pantai. Pantai di kawasan ini harus mudah dijangkau oleh masyarakat melalui sistem transportasi dan jaringan jalan yang memadai, serta dilengkapi dengan berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang menarik tanpa merusak lingkungan. Namun, pertumbuhan populasi yang terus meningkat menyebabkan berbagai permasalahan permukiman, seperti kepadatan penduduk dan kondisi lingkungan yang kumuh.

Sebagai permukiman nelayan, masyarakat Tambak Lorok sangat bergantung pada sumber daya alam, khususnya laut sebagai lokasi mencari ikan, serta sungai dan muara sebagai tempat menambat perahu dan akses keluar masuk perahu ke laut. Pola kehidupan ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Potensi utama kawasan ini adalah keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang juga mencakup Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Namun, seiring waktu, Tambak Lorok berkembang menjadi area dengan kepadatan tinggi dan mengalami penurunan kualitas lingkungan. Permasalahan seperti banjir, rob, penurunan tanah, intrusi air laut, dan penumpukan sampah menjadikan kawasan ini kumuh dan tidak sehat. Rendahnya tingkat ekonomi penduduk juga menyulitkan mereka untuk memperbaiki kondisi lingkungan.

Pada tahun 2016, jumlah penduduk Tambak Lorok tercatat sebanyak 30.678 jiwa yang tersebar di lima RW, yaitu RW 12 hingga RW 16. Dari jumlah tersebut, 30.675 jiwa adalah Warga Negara Indonesia (14.424 laki-laki dan 16.251 perempuan) dan 3 jiwa merupakan Warga Negara Asing (1 laki-laki dan 2 perempuan). Dengan lokasinya yang berada di sekitar pelabuhan, Tambak Lorok termasuk dalam kategori kawasan kumuh dengan kepadatan penduduk lebih dari 750 jiwa per hektare. Kampung ini memiliki 970 keluarga miskin (KK), yang menyumbang 36,02% tingkat kemiskinan di Kelurahan Tanjungmas. Dari jumlah KK miskin tersebut, 595 KK memiliki tanggungan ≤ 3 anggota keluarga, 358 KK memiliki tanggungan ≥ 4 , dan 16 KK memiliki tanggungan ≥ 8 .

Secara umum, masyarakat Tambak Lorok merupakan komunitas nelayan karena berada di wilayah pesisir dengan budaya bahari yang masih kuat. Namun, migrasi yang terjadi pada dekade 1970-an perlahan mengubah karakter kawasan ini. Pada masa tersebut, mulai berkembang berbagai industri baru di sekitar Tambak Lorok, yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor non-nelayan.

Akibatnya, penduduk Tambak Lorok kini terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu nelayan dan non-nelayan. Kelompok nelayan sendiri terdiri atas tiga kategori, yakni nelayan penangkap ikan, nelayan pekerja, dan nelayan penyedia jasa sewa perahu. Sementara itu, kelompok non-nelayan meliputi buruh, pegawai, dan pedagang. Secara geografis, wilayah utara Tambak Lorok yang berada di tepi kali mati dan pantai umumnya dihuni oleh masyarakat nelayan, sedangkan wilayah selatan dan tengah lebih banyak dihuni oleh masyarakat non-nelayan. Selain nelayan dan penjual ikan segar maupun ikan olahan, banyak penduduk Tambak Lorok yang bekerja sebagai pedagang, baik di pasar maupun dengan membuka warung di rumah mereka.

Sebagian besar penduduk Tambak Lorok merupakan migran dari berbagai daerah yang menetap di kawasan ini. Awalnya, mereka datang ke Tambak Lorok untuk mencari kehidupan yang lebih baik melalui urbanisasi. Namun, keterbatasan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia membuat banyak dari mereka akhirnya memilih bekerja sebagai nelayan atau buruh. Meskipun kondisi permukiman tidak layak, mereka tetap tinggal di Tambak Lorok karena

keterbatasan ekonomi dan kedekatan dengan tempat mencari nafkah. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya tingkat kemiskinan di Tambak Lorok, mengingat pendapatan dari profesi nelayan maupun buruh umumnya sangat rendah.